

Sungai Cilutung Meluap, 4 Desa di Kabupaten Bogor Kebanjiran

CIBINONG (IM) - Empat desa di Kabupaten Bogor, Jawa Barat terendam banjir akibat Sungai Cilutung meluap pada Senin (21/12). Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut hujan deras dalam durasi yang panjang di Bogor menjadi penyebab.

"Kondisi tersebut menyebabkan debit air Sungai Ci Lutung meluap. Kali ini merupakan anak Sungai Cidurian. Sedangkan empat desa terdampak tersebar di tiga kecamatan di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat," kata Plt. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi BNPB, Abdul Muhari lewat siaran pers, Selasa (21/12).

Ada 167 rumah warga dan 1 masjid yang terendam. Sedikitnya 172 kepala keluarga atau sekitar 350 jiwa terdampak banjir. Akan tetapi, tidak ada warga yang mengungsi. "BPBD setempat melaporkan tidak ada warga

mengungsi," ucapnya. Abdul lalu mengimbau kepada pemerintah setempat dan masyarakat agar tetap waspada mengingat hujan ringan-sedang berpotensi terjadi beberapa hari ke depan.

Abdul mengatakan ada 37 kecamatan di Kabupaten Bogor berpotensi banjir dengan kategori sedang hingga tinggi, termasuk kecamatan yang terendam pada Senin kemarin (20/12).

Namun banjir yang menggenangi sejumlah desa itu pada Selasa kemarin telah terpantau surut di wilayah terdampak. Warga kemudian membersihkan material sampah dan lumpur di rumah masing-masing.

"Meski demikian, warga diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi banjir susulan. Di samping itu, pemerintah daerah dan warga juga meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi puncak musim hujan," ujarnya. ● **gio**

Larang Kawin Kontrak di Puncak, Pemkab Bogor Siapkan Payung Hukum

CIBINONG (IM) - Praktik kawin kontrak masih terjadi di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor. Bupati Ade Yasin sedang menyusun payung hukum untuk melarangnya.

Ade menjelaskan, kawin kontrak biasanya melibatkan imigran asal timur tengah yang banyak tinggal di Puncak. Pemkab Bogor mengesahkan bahwa kawin kontrak merupakan tindak prostitusi.

"Biasanya kawin kontrak dilaksanakan wisatawan musiman yang cuma 2-3 bulan tinggal di sini. Tapi kan sekarang pandemi, jadi tidak ada wisatawan asing ya. Sudah berkurang lah, tapi masih ada 1-2 orang (kawin kontrak), seperti pengungsi," kata Ade, Selasa (21/12).

Dia berharap Kabupaten Bogor bebas dari praktik kawin kontrak setelah terbitnya payung hukum yang melarangnya. "Nanti kami terbitkan perbup, SK Bupati atau edaran untuk pencegahannya," tegasnya.

Di sisi lain, Ade meminta

pemerintah pusat menyiapkan lokasi pengungsian bagi imigran, khususnya dari Timur Tengah yang banyak tinggal atau bahkan membuka usaha, di Puncak.

"Kita minta pemerintah pusat untuk memindahkan tempat pengungsian itu ke tempat yang lain, jangan di jalur wisata karena mengundang polemik juga. Karena di belakang kawin kontrak ini prostitusi dan polisi sempat menangkap pelaku kawin kontrak ini, karena itu prostitusi berbungkus kawin kontrak dan sebetulnya yang menikahkan juga bukan amil sungguhan," katanya.

Penanganan fenomena kawin kontrak ini tertuang dalam 10 ijtima ulama Kabupaten Bogor, yang mendorong Pemkab Bogor untuk menyikapi problematika kawin kontrak atau kawin wisata yang banyak terjadi di wilayah Kabupaten Bogor dengan menerbitkan peraturan daerah tentang larangan dan antisipasi praktik itu. ● **gio**

8 | Nusantara



VAKSINASI COVID UNTUK ANAK DI SOLO

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka (kanan) meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 perdana untuk anak-anak usia 6-11 tahun di SD Negeri Kleco, Solo, Jawa Tengah, Selasa (21/12). Vaksinasi anak menargetkan sasaran sebanyak 26,5 juta anak berdasarkan data sensus penduduk 2020.

Ade Yasin: Bangun Jalan Baru di Wilayah Barat Terkendala Anggaran

Selain terkendala anggaran, pembangunan ruas jalan baru di wilayah Barat Kabupaten Bogor juga terkendala dengan lahan Perhutani atau Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS). Kendalanya kepemilikan lahan, di mana sebagian besar merupakan milik Perhutani atau TNGHS, tutur Ade Yasin.

CIBINONG (IM) - Bupati Bogor, Ade Yasin mengaku terkendala terbatasnya anggaran untuk pembangunan ruas jalan baru di wilayah Barat Kabupaten Bogor.

Semrawutnya tata ruang bagian Barat Kabupaten Bogor disinyalir jadi salah satu faktor terjadinya kemacetan di ruas jalan wilayah tersebut.

"Pemkab Bogor terkendala terbatasnya anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) tingkat II, karena

saat ini kami sedang membangun secara bertahap Jalan Raya Bojonggede-Kemang (Bomang) demi mempercepat waktu tempuh dari Cibinong menuju Parung," kata Ade Yasin kepada wartawan, Selasa (21/12).

Politisi PPP ini menerangkan, ke depan jajarannya akan membangun kelanjutan Jalan Lingkar Dramaga, Jalan Lingkar Leuwiliang dan Jalan Lingkar Ciampea dengan Rancabungur.

"Pemkab Bogor juga akan melanjutkan pembangunan Jalan Lingkar Dramaga, Jalan Lingkar Leuwiliang atau Galuga, Jalan Lingkar Ciampea dengan Rancabungur. Namun harus satu persatu pembangunannya. Kalau untuk pembangunan fly over, kami berharap ada investor," terangnya.

Ade menuturkan pembangunan ruas jalan baru di wilayah Barat, Kabupaten Bogor juga terkendala lahan Perhutani atau Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS).

"Kalau kami mau bangun ruas jalan baru yang menghubungkan Kecamatan Tamansari, Tenjolaya, Pamijahan hingga Nanggung, kendalanya kepemilikan lahan, di mana sebagian besar merupakan milik Perhutani atau TNGHS," tutur Ade.

Sebelumnya, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Jawa Barat, Asep Wahyuwijaya mengkritisi permasalahan kemacetan

lalu lintas di wilayah barat Kabupaten Bogor mulai dari Dramaga-Ciampea-Cibungbulang-Leuwiliang hingga bahkan Nanggung.

Hal itu karena ia menganggap karena Pemkab Bogor tidak punya niat serius untuk mengurai kemacetan tersebut. Ia menilai saat ini tidak ada rencana Pemkab Bogor untuk membangun jalan baru, di luar jalan yang sudah eksisting. Padahal perumahan tumbuh subur di wilayah barat Bumi Tegar Beriman.

"Untuk mengurai kemacetan lalu lintas kendaraan di wilayah barat, maka Pemkab Bogor harus membangun jalan baru yang menghubungkan antar kemacetan baik yang di wilayah barat maupun utara, lalu untuk ruas jalan yang milik pemerintah pusat atau Pemprov Jawa Barat, maka segera usulkan hingga turun anggaran DAK atau bantuan keuangan Provinsi Jawa Barat," kata Asep Wahyuwijaya kepada wartawan, Kamis (16/12) lalu. ● **gio**

POLISI UJI COBA GANJIL GENAP

Jalur Puncak Mulai Dijaga Ketat Jelang Nataru

PUNCAK (IM) - Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Bogor menggelar uji coba penerapan sistem ganjil-genap untuk kendaraan yang hendak menuju kawasan Puncak, Kabupaten Bogor mulai Senin (20/12) petang. Jalur uji dijaga ketat untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan pada libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Kasat Lantas Polres Bogor, AKP Dicky Pranata mengungkapkan, pihaknya telah menyiapkan 10 posko protokol kesehatan (proses) di seluruh gerbang tol menuju kawasan Puncak, termasuk di beberapa jalur alternatif.

"Jadi hari ini kita uji coba. Meski libur Nataru dimulai 24 Desember hingga 2 Januari, kita mulai lakukan uji coba dari 20 Desember, sambil terus dilakukan evaluasi," ucap Dicky, Selasa (21/12).

Dia memastikan, pemeriksaan kendaraan dilakukan selama 24 jam demi mencegah

terjadinya kerumunan selama libur Nataru, khususnya di tempat-tempat wisata. "Pemeriksaan meliputi kelengkapan proses, seperti penggunaan masker, kendaraan ganjil-genap sesuai tanggal, hingga surat vaksinasi atau aplikasi PeduliLindungi," tegasnya.

Untuk menyukseskan pemeriksaan ini, sedikitnya 280 petugas gabungan disiagakan hingga 2 Januari 2021, terdiri dari Polri, TNI, Dishub, Satpol PP. Mereka berjaga secara bergantian selama 24 jam.

Sementara itu, 10 titik gerbang tol menuju Puncak yang dijaga yakni Sentul, Cibanon, Simpang Gadag, hingga gerbang tol keluar Tol Bocimi, serta beberapa jalur alternatif yang biasa digunakan kendaraan roda dua.

"Untuk hari pertama ini, cenderung normal, belum ada kepadatan kendaraan, namun pemeriksaan tetap dilakukan," kata Dicky. ● **pur**

Ridwan Kamil: 2,43 Juta Warga Jawa Barat Menganggur

BANDUNG (IM) - Gubernur Jawa Barat, M Ridwan Kamil mengatakan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per 5 November 2021 jumlah angkatan kerja di Jawa Barat tahun 2021 mencapai 24,74 juta orang, terdiri 22,31 juta orang bekerja (90,18%) dan 2,43 juta orang menganggur (9,82%).

"Walaupun ada penurunan (angka pengangguran) sebesar 0,64% dari tahun lalu, tetapi angka tersebut masih termasuk tinggi dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia," kata Ridwan Kamil saat memberikan sambutan pada acara peluncuran Aplikasi Jabar Migrant Service Center (JMCS) dan Job Fair Jabar Online tahun 2021 di Bandung, Selasa (21/12).

Hal tersebut, kata Ridwan Kamil, selain disebabkan karena jumlah penduduk yang besar (49,94 juta orang), juga karena arus migrasi ke Jawa Barat cukup tinggi dan akibat pandemi Covid-19 yang berdampak secara signifikan terhadap sektor formal ketenagakerjaan.

"Berdasarkan data BPS, pekerja yang terdampak akibat pandemi Covid-19 di Jawa Barat sebesar 460.000 orang. Angka tersebut mengalami perbaikan setelah terdapat

penurunan sebesar 240.000 orang apabila dibandingkan dengan tahun 2020," kata dia.

Menurut dia, sampai saat ini Jawa Barat berada pada peringkat tiga besar pengirim pekerja migran Indonesia seperti saat ini masih ditemukan beberapa permasalahan berkenaan dengan pekerja migran Indonesia asal Jawa Barat.

"Kemudian masih terjadinya perubahan ABK, trafficking melalui modus BKK (Bursa Kerja Khusus), masih banyaknya buruh migran yang terancam hukuman mati, kerentanan PRT migran terhadap kekerasan fisik, seksual, psikis masih tinggi," kata Ridwan Kamil.

Kemudian kerentanan pekerja migran pada masa pandemi dan sistem informasi dan data yang belum terintegrasi.

Lebih lanjut ia mengatakan beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat di antaranya melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan daya saing calon pekerja.

Kemudian peningkatan tata kelola ketenagakerjaan dengan membangun sistem informasi dan data yang terintegrasi melalui pembangunan sistem manajemen Jabar Migrant Service Center (JMCS). ● **pur**



PERUBAHAN BENTUK KAWAH GUNUNG SEMERU
Awan panas guguran keluar melalui bukaan aliran lava baru Gunung Semeru terpantau dari Desa Supiturang, Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur, Selasa (21/12). Pusat Riset Aplikasi Penginderaan Jauh Lapan - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mencatat Gunung Semeru mengalami perubahan bentuk di wilayah kawah hingga lereng bagian tenggara akibat aktivitas vulkanik berupa luncuran awan panas guguran.

Pemkot Bogor Tidak Mengeluarkan Cuti ASN Saat Nataru

BOGOR (IM) - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melarang aparat sipil negara (ASN) untuk bepergian ke luar kota saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) tahun ini. Cuti diperbolehkan untuk sifatnya mendesak.

Hal itu dipastikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Syarifah Sopiha, Selasa (21/12). Pemkot, kata dia, telah mengeluarkan kebijakan dan meminta ASN Kota Bogor menahan diri untuk tidak bepergian ke luar kota saat libur Nataru pada tahun ini.

Karena, Pemkot Bogor sejalan dengan yang dilakukan pemerintah pusat terkait larangan cuti saat Nataru bagi ASN diatur dalam Surat Edaran (SE) Menpan RB Nomor 26 tahun 2021.

"Larangan ini dilakukan sebagai langkah pencegahan dan penanggulangan Covid-19 yang berpotensi meningkat dikarenakan perjalanan orang selama Nataru," katanya, Selasa (21/12).

Meski begitu, dijelaskan Syarifah, pengambilan cuti ASN dalam keadaan terpaksa masih diperbolehkan apabila akan melahirkan, sakit, ada keluarga inti sakit, meninggal dunia atau alasan mendesak lainnya.

"Saya tidak akan mengeluarkan izin cuti bagi PNS, terkecuali bagi yang mendesak. Karena harus melalui saya

ketika mereka mengajukan (cuti)," ucapnya.

Sementara, ditambahkan Syarifah, hingga kini belum ada berkas cuti ASN yang masuk ke meja kerjanya. "Enggak belum, mereka juga sudah paham sebenarnya," imbuh dia.

Saat disinggung antisipasi varian baru Covid-19, Pemkot Bogor mengikuti kebijakan yang dikeluarkan yang dilakukan Satgas Covid-19 Pusat.

"Varian omicron sebenarnya ketika sudah divaksin lebih tahan (terpapar), informasinya dampaknya juga tidak seganas varian delta. Tapi tetap dengan pembatasan Nataru jadi bagian tanggung jawab kita," bebernya.

Dirinya meminta kesadaran tak hanya bagi ASN, tetapi juga keluarganya, agar tetap berada di rumah.

"ASN tetap tidak boleh mengambil cuti dan ke luar daerah saat Nataru," katanya.

Namun larangan tersebut dikecualikan bagi ASN yang cuti melahirkan, cuti sakit, atau cuti karena alasan penting lain. Juga cuti melahirkan atau cuti sakit bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

"ASN yang bepergian untuk tugas kedinasan harus memperoleh surat tugas yang ditandatangani minimal pejabat tinggi pratama atau kepala kantor satuan kerja," katanya. ● **pra**

Memicu Kerumunan, Alun-alun Kota Bogor Ditutup Sementara

BOGOR (IM) - Setelah diresmikan pada Jumat (17/12), Alun-alun Kota Bogor di eks Taman Topi, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor kembali ditutup. Salah satu alasan penutupan Alun-alun Kota Bogor lantaran masyarakat ramai mendatangi alun-alun pada akhir pekan, hingga memicu terjadi kerumunan.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperumkim) Kota Bogor, Juniarti Estiningsih. Tak hanya itu, penutupan Alun-alun Kota Bogor juga dilakukan agar proses pemeliharaan alun-alun berjalan lancar.

"Alun-alun ini kan baru selesai, jadi butuh pemeliharaan terlebih dahulu. Apalagi rumput dan tanaman di sini baru kita tanam, khawatir rumput yang baru kita tanam terinjak-injak dan mati," kata Esti, Selasa (21/12).

Meski ditutup sementara, sambung Esti, masyarakat masih dapat berswafoto di sekitar alun-alun. Hanya saja, selama penutupan masyarakat tidak diperkenankan untuk nongkrong di dalam alun-alun. Serta tidak diperbolehkan untuk menggunakan fasilitas yang ada, seperti

jogging track, alat gym, dan permainan anak.

Saat ini, hampir semua fasilitas di Alun-alun Kota Bogor sudah dipasangi garis pembatas. Hal tersebut bertujuan sebagai tanda jika fasilitas Alun-alun Kota Bogor belum bisa digunakan untuk pengunjung.

Adapun sejumlah fasilitas yang dipasangi garis pembatas di antaranya fasilitas olahraga, permainan anak, jogging track, lapangan utama, area hall tribun teater, hingga sebagian besar area taman alun-alun yang ditumbuhi pepohonan dan tanaman.

"Intinya masyarakat boleh berkunjung ke Alun-alun Kota Bogor, hanya saja tidak boleh melewati garis polisi yang dipasang petugas. Kalau untuk foto-foto boleh saja, kalau untuk nongkrong dan duduk belum boleh," tegasnya.

Di samping itu, lanjut dia, masyarakat yang hendak menggunakan Kereta Rel Listrik (KRL) melalui Pintu Timur Stasiun Bogor masih bisa melewati alun-alun. Hanya saja, harus berhati-hati untuk tidak melewati rumput atau taman yang masih dalam pemeliharaan.

Esti menambahkan, pi-

haknya berencana menggunakan aplikasi PeduliLindungi di Alun-alun Kota Bogor. Serta hanya membuka satu pintu masuk untuk mengantisipasi terjadinya kerumunan.

"Jadi tidak semua pintu terbuka karena terkait dengan kerawanan Covid-19. Nanti kita komunikasikan dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor, dan Kementerian Kesehatan (Kemkes) terkait aplikasi PeduliLindungi yang bisa digunakan untuk area terbuka," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim, menjelaskan saat ini Alun-Alun Kota Bogor masih bersifat uji coba. Selain itu, Pemkot Bogor akan melakukan evaluasi di berbagai hal.

Dedie menyebutkan, evaluasi dilakukan tidak hanya terkait kerumunan. Tetapi juga pada parkir kendaraan, sampah, kerumunan, akses ke stasiun, lampu, serta rumput yang terinjak-injak.

"Alun-alun saat ini masih bersifat uji coba dan dievaluasi. Rencana untuk sementara fasilitasnya akan ditutup dulu. Hanya aksesnya yang boleh dilalui," ujar Dedie. ● **gio**



RENCANA PENGOPERASIAN TOL CISUMDAWU

Foto udara pintu keluar Jatiningor pada proyek Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) di Jatiningor, Kabupaten Sumedang, Selasa (21/12). Satuan kerja Jalan Tol Cisumdawu berencana membuka secara fungsional ruas jalan seksi 1 (Cileunyi-Pamulihan) sebelum libur Natal 2021 dan Tahun Baru.